

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI HUKUM DAN PENYELESAIAN
SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Proses Pengadaan
Barang/Jasa di Direktorat Pengembangan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik perlu menetapkan kembali
Pejabat/Pegawai Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat
Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggaah
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan
Atas Keputusan Deputi Bidang Hukum dan
Penyelesaian Sanggaah Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN JABATAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA
HASIL PEKERJAAN PADA UNIT ORGANISASI DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
1.	Anita Carollin, S.Sos NIP. 19810928 201012 2 001 Pengolah Data Tata laksana	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
2.	Rita Agustini Sumardi, A.Md NIP. 19780813 201012 2 001 Penelaah Bahan Tata Usaha	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Umum dan Keuangan
3.	Ratna Ayu Maruti, S.I.P NIP. 19870325 201012 2 001 Calon Pranata Hubungan Masyarakat	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
4.	Desi Kartika, S.H. NIP. 19891212 201211 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
5.	Mita Astari Yatnanti, S.E. NIP. 19850924 201012 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
6.	Jochanan Setyo Adhi Nugroho, S.E. NIP. 19840503 201012 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
7.	Mia Adhi Paramitha, S.E. NIP. 19840127 201012 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
8.	Andy Martanto, S.T. NIP. 19760309 201012 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
9.	Sugianto, S.T NIP. 19820408 201012 1 001 Calon Pranata Komputer	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
10.	Resa Anggriani, S.Psi NIP. 19860709 201012 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Profesi
11.	Anatasia, S.Psi NIP. 19881217 201012 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pelatihan Kompetensi
12.	Agung Widayat, S.T. NIP. 19760430 201012 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Sertifikasi Profesi
13.	Lintong Janji Natogu Sinambela, S.E. NIP. 19820424 201012 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah I
14.	Mirna Medita Endikasari, S.E. NIP. 19860112 201012 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah II
15	Ade Rizky Emirsyah, S.T. NIP. 19840509 201012 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2015

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,



IKAK GAYUH PATRIASTOMO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakannya.